



## Dilema Republik: Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga (1910-1981)

Leonardo Haloho<sup>1</sup>, Suprayitno<sup>2</sup>, Nuhung<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Corresponding author

E-mail addresses: [leonardo514@gmail.com](mailto:leonardo514@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received October 30, 2024

Revised November 10, 2024

Accepted November 30, 2024

Available online December 08, 2024

#### Kata Kunci:

Dilema; Republik; Kisah Sejarah

#### Keywords:

Dillema; Republic; History



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan  
Sagita Akademia Maju.

### ABSTRAK

Artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari tahap heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi dalam menjelaskan seorang tokoh dari Simalungun, yaitu Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh ini memiliki peran penting dalam perjalanan Indonesia menjadi sebuah negara. Sejak masa penjajahan Belanda, Kaliamsyah, sebagai keturunan Raja Simalungun dan pada periode berikutnya menjadi Raja Simalungun terakhir, telah ikut serta dalam perjuangan mengawal kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada bulan Agustus 1945, satu tahun setelah kemerdekaan, Kaliamsyah dan keluarganya menjadi korban Revolusi Sosial Sumatera Timur pada tahun 1946. Hingga pada tahun 1948, Raja Kaliamsyah diangkat menjadi Wali Kota Sumatera Timur (NST) dengan pertimbangan agar Indonesia segera terbebas dari belenggu Belanda dan atas saran dari Moh. Hatta. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia memutuskan hubungan dengan Belanda secara sepihak. Sejak saat itu, Kaliamsyah Sinaga menanggalkan identitasnya sebagai Raja terakhir dari kelompok etnis Simalungun dan melanjutkan karirnya di Jakarta hingga meninggal pada tahun 1980 sebagai seorang yang tetap setia kepada Republik hingga akhir hayatnya.

### ABSTRACT

This article uses a historical method consisting of heuristic, verification, interpretation, and historiography stage in explaining a figure from Simalungun, namely Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga. The research results show that this figure was important in Indonesia's journey to becoming a country. Since Dutch colonialism, Kaliamsyah, as a descendant of the King of Simalungun and in the following period became the last King of Simalungun, has participated in the struggle to guards Indonesia's independence. After Indonesia gained independence in August 1945, one year after its indepence, Kaliamsyah and his family became victims of the East Sumatran Social Revolution in 1946. Until 1948, King Kaliamsyah was appointed as Mayor of East Sumatra (NST) with the consideration that Indonesia would quickly be free from sthe shackles of the Dutch and suggestions from Moh. Hatta. In the late 1950s, Indonesia cut ties with the Netherlands uniterally. Since than Kaliamsyah Sinaga abandoned his identity as the last King of the Simalungun ethnic group and continued his career in Jakarta until he died in 1980 as a person who remained loyal to the Republic until the end of his life.

## 1. PENDAHULUAN

Perjalanan hidup seorang tokoh dapat direkam dalam bentuk karya sejarah yang disebut sebagai biografi. Tujuan penulisan biografi ialah untuk memberikan inspirasi dan refleksi bagi generasi selanjutnya. Titik kajian biografi membahas

riwayat hidup seorang tokoh (pemimpin) yang berhasil mengemban suatu amanat dalam perjalanan hidupnya melalui tindakan maupun pemikiran-pemikirannya (Surjomihardjo 1978). Dengan demikian, studi ini akan membentangkan sosok Raja Kaliamsyah Sinaga yang berasal dari Swapraja Tanah Jawa (Simalungun) yang memiliki peran pada era kemerdekaan Indonesia dan sempat menjadi Wakil Wali Negara Sumatera Timur (NST). Perlu diketahui NST merupakan negara boneka yang dibentuk oleh H. J. Van Mook untuk melanggengkan kekuasaan Belanda di Indonesia pada tahun 1950 (G. M. Kahin 2022). Walaupun dianggap sebagai negara boneka Kaliamsyah tetap menerima jabatan Wakil Wali Negara NST dengan pertimbangan tertentu.

Kaliamsyah Sinaga di lahirkan di Pematang Tanah Djawa pada tanggal 20 Agustus 1910, dari Ibunda Puang Nakut. Kaliamsyah Sinaga adalah keturunan dari seorang raja, yaitu Tuan Sangmajadi selaku Raja Tanah Jawa yang bila dirunut adalah raja ke XI dari kerajaan Tanah Jawa. Kaliamsyah Sinaga memperistrikan yang menjadi sebagai permaisuri Puang Bolon Salimah Damanik (Putri dari Tuan Sawadin Damanik/Raja Kerajaan Siantar) dan dikaruniai anak perempuan yang diberi nama Asmara Sinaga. Kepribadian Raja Kaliamsyah dipengaruhi oleh pendidikan formal barat, oleh karena beliau adalah anak dari seorang Raja, sehingga beliau mendapat tiket dapat bersekolah di HIS Pematang Siantar sampai menempuh pendidikan tinggi berangkat untuk mendapatkan keilmuan gelar Mr. (gelar Sarjana Hukum saat itu) ke Jakarta dan memiliki kemauan untuk mengemban pendidikan di sekolah yang didirikan oleh bangsa kolonial Belanda pada waktu itu. Beliau mengemban pendidikan mulai jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah atas di Sumatera Timur sampai melanjutkan studi perkuliahan di Fakultas Hukum di Jakarta pada tahun 1940 (P.A.L.E 1894).

Pada Maret 1946 terjadi Revolusi Sosial di Simalungun, kerajaan-kerajaan yang sudah berdiri lama di Simalungun menjadi sasaran utama dan hancur dalam beberapa hari saja. Latar belakangnya terjadi Revolusi Sosial adalah untuk membersihkan sisa-sisa budaya feodal dan kolonialisme yang dianggap menghambat perjalanan bangsa Indonesia sebagai negara yang baru merdeka oleh Persatuan Perjuangan (Volksfront) (Malaka 2017, 21). Revolusi Sosial kemudian meledak di bulan Maret 1946 banyak raja-raja di Simalungun dibunuh, harta benda Swapraja di Simalungun dijarah oleh kaum revolusioner, dan istana Swaparaja dihancurkan (Reid 2016). Saat Revolusi sosial tahun 1946 bergulir untungnya Raja Kaliamsyah Sinaga diselamatkan oleh Tn. Sawadin Damanik/Raja yang berasal dari Kerajaan Siantar. Sebab beliau telah mengetahui desas-desus-desus bahwa akan terjadi kerusuhan yang dicituskan oleh pasukan Barisan Harimau Liar (BHL) (Suprayitno 2001, 134).

Pada Pada tanggal 19 Januari 1948 Simalungun masuk dalam Negara Sumatera Timur/NST, Kaliamsyah Sinaga terpilih menjadi Wakil Wali NST yang diketuai oleh Dr. Mansoer. Pada tahun 1949 Kaliamsyah Sinaga menjadi Ketua Delegasi mewakili Negara Sumatera Timur pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Hagg Belanda. Akhir dari hasil Konferensi Meja Bundar tersebut pada tahun 1950 NST (termasuk Simalungun) masuk ke dalam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Sejak saat itu Kaliamsyah Sinaga menanggalkan identitasnya sebagai "Raja Terakhir" dari Tanah Jawa (Simalungun) dan melanjutkan karir ke Ibukota Jakarta. Diketahui pada tahun 1980 Kaliamsyah melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci Makkah dan di sana pulalah

ia menghembuskan nafas terakhirnya sebagai keturunan Swapraja yang seringkali dikonotasikan buruk tetapi dalam diri Kaliamsyah ia tetap setia kepada Republik hingga akhir hayatnya (Sinaga 2022)

Dengan demikian, rumusan dan tujuan kajian ini ialah menjelaskan perjalanan Raja Kaliamsyah Sinaga yang berasal dari keturunan Swapraja atau seringkali dikatakan sebagai feodal. Sekalipun Raja Kaliamsyah dan kerabatnya menjadi korban keganasan Revolusi Sosial 1946 Sumatera Timur. Namun Kaliamsyah tetap setia memperjuangkan Republik sampai kemudian bebas dari belenggu Belanda pada tahun 1950 lalu kemudian ia sendiri wafat di Makkah pada tahun 1981. Hal ini akan menjadi menarik karena umumnya manusia cenderung membela keluarga/kelompoknya ketika dicerai oleh pihak dari luar mereka. Tetapi hal itu tidak berlaku bagi seorang Raja Kaliamsyah Sinaga yang berasal dari Tanah Jawa (Simalungun) itu (Sinaga 2022).

Terkait kajian ini perlu kiranya untuk membentangkan terlebih dahulu karya-karya sebelumnya untuk melihat persamaan maupun perbedaan sehingga dapat terlihat kebaruan dari kajian yang dilakukan. Budi Agustono, dkk, dalam "Sejarah Etnis Simalungun" hasil penelitian itu menunjukkan bahwa etnis Simalungun mempunyai raja setiap periodenya sampai kemudian Kaliamsyah Sinaga sebagai raja terakhir dari Kerajaan Tanah Jawa (Simalungun). Meletusnya peristiwa Revolusi Sosial 1946 menjadi indikasi berakhirnya kekuasaan Swapraja di Simalungun. Dalam peristiwa dahsyat itu Kaliamsyah Sinaga dapat lolos dari tragedi maut itu karena diselamatkan oleh Tn. Sawadin Damanik (Budi Agustono 2012).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Erond Damanik dalam "Menafsir Kebudayaan Lewat Foto" karya itu lebih menekankan Tentang bagaimana ketika Tn. Kaliamsyah Sinaga diutus sebagai salah satu delegasi Wakil Wali Negara dari NST menghadiri Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag Belanda ketika saat merundingkan nasib kewilayahan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. perannya cukup sentral karena menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Negara Sumatera Timur, Kaliamsyah menemani Ketua Wali NST Bapak Dr. Mansoer (Damanik 2018).

Terakhir, Suprayitno dalam "Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia" memaparkan tentang awal mula terbentuk Negara Sumatra Timur (NST) yang di dalam memuat Simalungun sebagai bagian dari "negara boneka" yang dibentuk oleh H.J. Van Mook. Tetapi karya ini berargumentasi bahwa sebuah kesadaran perlu dibangun untuk memberikan perlindungan identitas kultural lokal karena dapat dikatakan hal itu semua lah yang merajut perjalanan bangsa sehingga dikenal sebagai negara Indonesia (Suprayitno 2001).

Beberapa karya yang dijelaskan sebelumnya sedikit-banyaknya menyinggung Raja Kaliamsyah Sinaga sebagai raja terakhir Tanah Jawa (Simalungun). Tetapi penulisan terhadap sejarah Raja Kaliamsyah dalam beberapa karya di atas hanya dijadikan sebagai pengisi ruang kosong dalam setiap periode yang dikaji setiap pengarang. Dengan demikian, belum ada upaya untuk memfokuskan kajian terhadap Raja Kaliamsyah Sinaga secara mandiri sampai kemudian ia wafat pada tahun 1981. Selain itu, belum ada penjelasan rinci mengapa Kaliamsyah memilih bergabung dengan NST, sementara NST dikenal sebagai "negara boneka" karya Van Mook. Oleh karena itu hal-hal demikian perlu dijelaskan secara lebih rinci dalam artikel ini.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan karya biografi yang menyoroti Raja Kaliamsyah Sinaga lebih mendalam dengan menggunakan metode sejarah yang terdiri dari: heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Syamsuddin 2007). Heuristik (pengumpulan sumber) dilakukan dengan studi arsip yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya: Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 152 Tahun 1953; No. 68 tertanggal 20 April 1953, Pengangkatan sebagai Pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Raja Kaliamsjah Sinaga: *Nederlanders krijgen straks Positie van Bevoorrecht Buitenlanders, "Deli courants en De Sumatra Post"*: Vrijdag 2 September 1949. No. 351, dan *SoK Het Recht op de Woeste Grond in het Landschap Tanoh Djawa, Kaliamsjah Sinaga, 1939*. Selain itu, juga dilakukan wawancara langsung kepada anggota keluarga Raja Kaliamsyah Sinaga di Tanah Jawa yang saat ini merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Simalungun (Vansina 2017). Setelah sumber-sumber dikumpulkan, selanjutnya dilakukan verifikasi (kritik) sumber dengan melihat jenis kertas, jenis huruf, dan substansi setiap sumber untuk menghasilkan sumber yang autentik dan kredibel. Kemudian dilakukan interpretasi (penafsiran sumber) baik yang bersifat analitik maupun sintetik untuk menghasilkan sumber-sumber yang padu dan akurat. Terakhir, historiografi (penulisan sejarah) karya sejarah ditulis secara kronologis, sistematis, dan logis (Kuntowijoyo 2014).

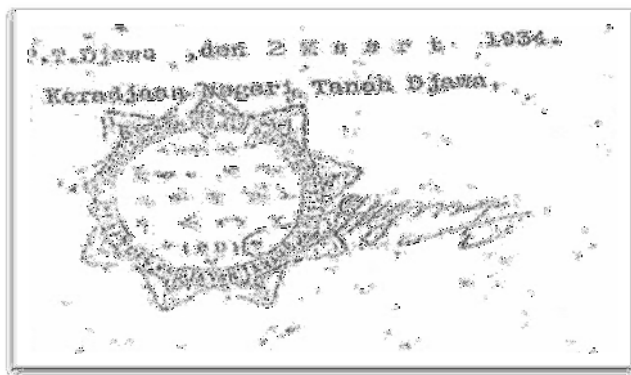
## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Ditakdirkan Menjadi Seorang Raja**

Kaliamsyah Sinaga lahir pada tanggal 20 Agustus 1910 di Pematang Tanah Jawa yang merupakan wilayah dari Kerajaan Jawa. Kaliamsyah mempunyai seorang Ibu bernama Puang Nakut dan Ayahnya bernama Tuan Raja Sangmajadi Sinaga yang memerintah sejak dari tahun 1919 sampai pada tahun 1940. Jika dirunut Raja Sangmajadi merupakan raja ke-IX setelah menggantikan Tuan Jintar Sinaga yang mangkat pada tahun 1917 ketika dalam pengasingan di Medan (Budi Agustono 2012, 67). Pribadi Kaliamsyah Sinaga waktu kecil umumnya banyak dihabiskan di lingkungan Kerajaan. Kebiasaan seperti ini sebenarnya sangat sering ditemui di berbagai jenis Kerajaan yang ada di Indonesia. Anak-anak raja jarang berbaur langsung dengan masyarakat dengan alasan tertentu, misalnya menjadi lumbung hasutan untuk melakukan kudeta atau barangkali anak raja bisa menjadi tawanan para perampok untuk diminta tebusan. Anak-anak raja diberi kebebasan untuk meninggalkan Kerajaan jika sudah dewasa karena dengan begitu anak raja sudah dianggap mampu untuk menjaga dirinya (Ricklefs 2017, 170).

Sejak masuknya perkebunan di Sumatera Timur akhir abad ke-19 terjadi perubahan terhadap tata kelola wilayah di Pematang Siantar sampai kemudian disahkan menjadi Kotaprdja (Gementee) (Pelzer 2016). Sejalan dengan itu, pembangunan fasilitas semakin digalakkan, seperti kereta api, jalan raya, dan sekolah (Leirissa 2017). Akibatnya raja-raja lokal seperti Raja Sangmajadi pun berniat menyekolahkan anaknya ke luar daerah. Kaliamsyah Sinaga kemudian disekolahkan ke *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*. Tidak sampai di situ saja, Kaliamsyah Sinaga terus melanjutkan pendidikannya sampai ke Jakarta. Di sana ia bertemu dengan

orang-orang pergerakan, seperti, Moh. Hatta. Tentu perjumpaan dengan tokoh-tokoh yang demikian telah membentuk karakter Kaliamsyah Sinaga dalam memandang ide-ide pergerakan yang bergolok di Hindia-Belanda pada masa itu. Singkatnya ia pun menamatkan studinya dan mendapat gelar Master (Mr) di bidang hukum pada tahun 1940. Pencapaian ini dapat dikatakan luar biasa untuk setingkat anak yang berasal dari raja lokal di salah satu wilayah pedalaman Sumatera Timur (Damanik 2018).



*Gambar 1. Stempel Kerajaan Tanah Jawa dan tanda tangan dari Tuan Raja Majadi Sinaga  
(Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia)*

Tidak banyak kemudian kiprah Kaliamsyah di bidang pergerakan maupun pendidikan karena pada tahun 1941 ia harus kembali ke Tanah Jawa untuk menganantikan posisi ayahnya sebagai seorang raja karena telah menjadi takdirnya sebagai orang yang menganut sistem budaya patriarki (ANRI, SoK Het recht op de Woeste Grond in het Landschap Tanoh Djawa, Kaliamsjah Sinaga 1939). Setelah kembali Kaliamsyah Sinaga pun dinobatkan sebagai raja pada tahun 1941 menjadi Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga yang memimpin wilayah Tanah Jawa (Simalungun) (Courant 1941). Dalam hal pengangkatan Raja Tanah Jawa diangkat oleh orang-orang pemerintahan seperti Raja Siantar dan Tanjung Kasau. Dia memiliki kekuasaan paling terjamin atas kawulanya daripada ketiganya dan memiliki wilayah paling luas serta paling subur (ANRI, SoK Het recht op de Woeste Grond in het Landschap Tanoh Djawa, Kaliamsjah Sinaga 1939). Ketika itu dia memiliki kekuasaan mutlak atas seluruh daerah dan kawulanya seperti Raja Siantar; ini dijelaskan kepada komisi (Budi Agustono 2012, 112). Raja Tanah Jawa adalah anak yang dilahirkan dari puang bolon, seperti halnya kedua rekannya beliau diakui dan dikukuhkan oleh seluruh penduduk, pertama-tama oleh empat tungkat atau raja namara. Mereka adalah Tuan Batangiya Sinaga, Hatunduhan, Dolok Paribuan, dan Merjanjen (P.A.L.E 1894, 80). Sebagai seorang yang telah menjadi raja di Tanah Jawa, Kaliamsyah kemudian menikah dengan Solimah Damanik, putri Raja Tuan Sawadim Damanik, pemangku raja di Kerajaan Siantar (Sinaga 2022).



**Gambar 2.** Raja Kaliamsyah Sinaga dan Istri Solimah Br. Damanik  
(Sumber: KITLV)

Pemerintahan Raja Kaliamsyah Sinaga dikenal mempunyai kebijakan yang adil terhadap rakyatnya (Courant 1941). Ia selalu memastikan kebutuhan masyarakatnya sudah tercukupi mengingat setelah dua tahun memerintah Kerajaan Tanah Jawa terjadi suksesi kekuasaan antara Jepang dengan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, terjadi kelaparan di wilayah Simalungun, sebagai Kerajaan tentu ini tidak menghambat aktivitas kerajaan Kaliamsyah karena bagaimana pun pihak Jepang akan berusaha memenuhi kebutuhan raja-raja lokal (Kurasawa 2016). Namun Kaliamsyah bertindak lain dengan membagikan sebagian besar persediaan kebutuhan pokoknya kepada masyarakat untuk meminimalisir bencana ini dan ia hanya mengambilnya seperlunya saja. Satu contoh teladan raja yang lebih mementingkan kebutuhan orang banyak dibandingkan dirinya sendiri. Wabahnya kelaparan itu memang tidak berlangsung cukup lama karena pada akhirnya Jepang kalah pada Perang Dunia Kedua yang menandai berakhirnya kekuasaan Jepang di Simalungun (Oktorino 2017, 68).

### ***Revolusi Sosial dan Menjadi Wakil Wali Negara Sumatera Timur***

Sejak berakhirnya kekuasaan Jepang melalui Soekarno dan Moh. Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan perlu diketahui berita kemerdekaan Indonesia belum menyebar ke seluruh wilayah Indonesia pada hari itu juga. Di Sumatera Timur berita kemerdekaan baru diketahui beberapa bulan kemudian. Setelah berita kemerdekaan Indonesia menyebar di wilayah Sumatera Timur, seperti di Medan, Langkat, Tanjung Balai, Serdang, dan Simalungun. Para raja setempat termasuk Raja Kaliamsyah sendiri belum mengetahui secara pasti apakah benar Indonesia telah merdeka atau hanya propaganda Jepang semata (Hasibuan 2021). Kebingungan ini semakin menjadi-jadi ketika tentara NICA mendarat di Pelabuhan Belawan pada bulan Oktober 1945 ini memberi sinyal bahwa Indonesia di mata para raja lokal belumlah merdeka seperti yang diberitakan sebelumnya. Kedatangan pasukan NICA ini disambut baik para raja lokal dengan membentuk "Komite Penyambutan" atau yang sering dikenal sebagai *Committee van Ongst* (Reid, Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional 2012)

Sikap para raja lokal ini membuat geram pihak Republikan, seperti lasykar, barisan pemuda, dan kelompok-kelompok yang pro republik. Perlu diketahui suasana

di Sumatera Timur dapat dikatakan begitu mencekam pada awal kemerdekaan karena terjadi penjarahan, pembunuhan, dan berbagai jenis kekacauan lainnya layaknya seperti sebuah wilayah tanpa pimpinan. Sementara itu sejak akhir tahun 1945 Persatuan Perjuangan (*Volksfront*) sedang merencanakan program minimum menuju Indonesia Merdeka 100%. Maksud dari Merdeka 100% penghapusan tindakan atau budaya yang masih bersifat kolonial, feodal (raja-raja lokal), dan asing terutama orang-orang Tionghoa dari bumi Indonesia. Menurut Persatuan Perjuangan, kelompok-kelompok demikianlah yang membuat bangsa Indonesia terjajah selama berabad-abad lamanya (Anderson 2018, 144).

Berdasarkan dokumen resmi yaitu hasil pemeriksaan yang berwajib dan laporan Gubernur Militer VII Sumatera Utara (Kolonel M. Simbolon) yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan RIS di Jakarta dapat diketahui bahwa pelaksanaan Revolusi Sosial di Simalungun sebagai berikut:

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 Mei 1952 A.E. Saragihras menjelaskan bahwa dia selaku pimpinan Barisan Harimau Liar (BHL) Simalungun yang berkedudukan di Pematang Siantar, benar telah melaksanakan Revolusi Sosial di Simalungun dan di tempat-tempat lain terhadap Raja-raja dan para pengikutnya sejak 3 Maret 1946. Berarti gerakan ini mereka lakukan sebulan sejak pertemuan Sukamulia dimana wakil Markas Agung Mr. Luat Siregar juga turut berbicara.
- Pembunuhan-pembunuhan dan perampasan harta benda yang dilaksanakan oleh BHL adalah atas perintah Markas Agung yang disampaikan oleh Sarwono Sastrosutardjo, Mohammad Saleh Umar dan Zainal Bacharuddin.

Pada 3 Maret 1946 gerakan revolusioner ini telah mencapai puncaknya dengan dihentikannya kekuasaan Raja-Raja yang ada di Sumatera Timur, Revolusi sosial di Sumatera Timur dilancarkan atas intruksi perubahan. Perjuangan setempat yang sudah menjalankan kekuasaan semi-pemerintah sebab hal itu merupakan tindakan yang secara efektif mewakili kasus pemuda bersenjata. Pada waktu raja-raja Melayu, Simalungun, dan Karo ditangkap bersama relasi-relasi mereka diseluruh Sumatera Timur dan pejabat-pejabat baru sayap kiri dipilih menggantikannya, angkatan darat dan pejabat gubernur menyetujuinya (Simbolon, Pemeriksaan yang Berwajib dan Laporan Gubernur Militer VII Sumatera Utara 1952).

Setelah keadaan di Kerajaan Tanah Jawa kembali normal diadakan pemeriksaan didapatkan Rumah Bolon telah rata dengan tanah setelah dibakar oleh Barisan Harimau Liar (BHL) begitu pula dengan pusaka-pusaka dan harta benda kerajaan yang tidak sempat diselamatkan, untuk sementara waktu seluruh kegiatan Raja Kaliamsyah Sinaga dilakukan dirumah batu (rumah pribadi T. Sawadin Damanik) sampai dengan tahun 1947 (Majalah Saur 2012).

Saat Revolusi Sosial terjadi Raja Kaliamsyah diselamatkan oleh panggilan Tuan Sawadin Damanik, yang mana sehari sebelum Revolusi Sosial tahun 1946 tersebut Tuan Sawadin Damanik/Raja Siantar memanggil Radja Kaliamsyah Sinaga untuk datang ke Siantar dikarenakan yang bersangkutan telah mendengar desas-desus akan terjadi kerusuhan, mengingat yang memanggil adalah mertua yang sangat dihormati maka berangkatlah Raja Kaliamsyah Sinaga bersama Puang Bolon Salimah Damanik berserta Puang Nakut dan Puang Salak untuk memenuhi panggilan tersebut yang akhirnya selamatlah mereka untuk sementara waktu dari keganasan pasukan Barisan

Harimau Liar (BHL) yang mengganas dalam melakukan aksinya di Kerajaan Tanah Jawa (Suprayitno 2001).

Tuan Omsyah Sinaga dan Tuan Kalam Sinaga saat revolusi sosial tahun 1946 berlangsung mereka sedang berada di Tanah Djawa untuk mengawasi kegiatan sehari-hari dari kerajaan Tanah Djawa, mereka berdua langsung ditangkap oleh gerombolan Barisan Harimau Liar (BHL) dan keesokan malamnya saat akan diadakan eksekusi pelemparan ke sungai yang sedang mengalir deras tiba-tiba dua orang eksekutor yang memakai penutup kepala dikeremangan malam mendekati dan mengendurkan seluruh ikatan yang melilit kedua tangan Tuan Omsyah Sinaga dan Tuan Kalam Sinaga. Setelah didorong dan dilempar ke sungai yang mengalir deras Tuan Omsyah Sinaga dan Tn. Kalam Sinaga berusaha melepaskan seluruh ikatan dan berenang ketepi untuk menyelamatkan diri dan pulang ke Tanah Jawa yang segera langsung diselamatkan oleh penduduk/rakyat Kerajaan Tanah Jawa pada suatu tempat yang dirahasiakan sampai dengan situasi aman. Beberapa hari setelah kejadian di Kerajaan Tanah Jawa, Tuan Sawadin Damanik beserta Tuan. Radja Kaliamsyah Sinaga yang sedang menginap di Siantar ditangkap oleh Barisan Harimau Liar (BHL) dan dibawa ke Brastagi dan selama beberapa hari di Berastagi mereka dipekerjakan sebagai tenaga pekerja paksa (tenaga kerja rodi) (Sinaga 2022).

Setelah acara pemakaman selesai orang-orang Barisan Harimau Liar (BHL) yang mengantar/mengawal Raja Kaliamsyah Sinaga di hadapan rakyat/masyarakat Kerajaan Tanah Jawa berkata "inilah Radja kalian yang telah menindas dan memeras kalian dan kami akan membebaskan kalian dengan cara membunuhnya di hadapan kalian". Mendengar ucapan orang-orang BHL tersebut Raja Kaliamsyah Sinaga merasa seolah-olah ada yang membisikinya agar yang bersangkutan bicara dihadapan rakyatnya/masyarakat. Kemudian Tn. Raja Kaliamsyah Sinaga berbicara dan bertanya kepada rakyatnya yang disaksikan oleh orang-orang Barisan Harimau Liar (BHL) yang mengantarnya dari Berastagi ke Tanah Jawa "Apakah selama masa pemerintahan saya, saya pernah memeras, menindas, bertindak sewenang-wenang ataupun menyakiti kalian semua?

*"Maka dengan serentak seluruh rakyat/masyarakat yang hadir menjawab" tidak pernah, Raja kami adalah Raja yang baik, jujur, dan tidak pernah menindas kami" (Sinaga 2022).*

Mendengar jawaban rakyat tersebut maka orang-orang Barisan Harimau Liar (BHL) yang menyaksikan tersebut merasa malu dan langsung pulang ke Berastagi tanpa membawa kembali Raja Kaliamsyah Sinaga. Atas perintah pemerintah Indonesia orang-orang yang terlibat baik itu tokoh maupun partisipan pada peristiwa Revolusi Sosial ditangkap oleh pihak berwajib untuk kemudian diadili dan untuk sementara waktu situasi kembali aman (Damanik 2018).

Pasca Revolusi Sosial Belanda kemudian memanfaatkan situasi untuk membentuk Negara Federal, yakni Negara Sumatera Timur. Rencana ini kemudian berjalan dengan mulus, sebab Indonesia di mata internasional telah tercoreng karena tidak mampu melindungi segenap tumpah darah bangsanya. Sejak tahun 1947 Negara Sumatera Timur (NST) sudah dimulai dirancang oleh Van Mook sebagai upaya terus-menerus memecah belah bangsa Indonesia (Suprayitno 2001, 149).

Pada awal 1947 Raja Kaliamsyah Sinaga dihubungi oleh Moh. Hatta/Wakil Presiden Republik Indonesia yang memang telah dikenalnya semasa kuliah di Fakultas Hukum di Jakarta yang mana beliau menyatakan bahwa Belanda dalam

politik pecah belahnya dalam waktu dekat akan membentuk negara bagian Sumatera Timur yang berpusat di Medan dengan calon Presidennya/Wali Negara adalah Dr. Mansoer dan diharapkan Raja Kaliamsyah bersedia dan dapat bergabung dalam Negara Sumatera Timur yang akan dibentuk. Mendengar permintaan ini awalnya Kaliamsyah Sinaga bingung, ia seolah-olah sedang dilema Republik yang baru lahir. Di satu sisi Kaliamsyah sebenarnya mendukung Republik, namun jika ia mendukung NST yang akan dibentuk itu berarti ia telah mengkhianati prinsipnya, tentu ini merupakan pilihan yang sulit. Setelah melalui pertimbangan-pertimbangan ia kemudian mau menerima untuk menjabat sebagai Wakil Wali Negara Sumatera Timur merupakan bagian dari strategi untuk memulihkan keadaan yang sebelumnya telah kacau (Suprayitno 2001).

Raja Kaliamsyah kemudian menerima permintaan Moh. Hatta untuk menjadi Wakil Wali Negara NST atas beberapa pertimbangan sebagai berikut: Pertama, kerajaan Tanah Jawa dan kerajaan-kerajaan lain yang berada di Simalungun seluruhnya yang sudah hancur akibat dari dampak Revolusi Sosial 1946 yang didalangi oleh Barisan Harimau Liar (BHL) dimana kerajaan-kerajaan tersebut sudah tidak mungkin dapat berdiri lagi dan berdaulat di dalam Negara Republik Indonesia yang berarti bahwa (tidak mungkin ada kerajaan yang berdaulat di dalam suatu negara). Maka dari itu perlu ada perlindungan akan bekas-bekas swapraja. Kedua, guna menghindari perang saudara bilamana Wakil Wali Negara tidak dipegang oleh Asli Putera Daerah, karena pada saat itu saudara-saudara yang berasal dari daerah Karo, Toba dan Tapanuli Selatan telah bersiap-siap menyerang Medan bilamana Wakil Wali Negara bukan berasal dari Putera Daerah/Putera Asli Batak yang memiliki marga. Maka seyogianya Wakil Wali Negara diwakilkan oleh sub etnis dari kerajaan tersebut. Dan yang terakhir adalah agar memberikan kemudahan-kemudahan terhadap eks Kerajaan di Simalungun yang telah hancur tersebut untuk agar dapat menata kembali kehidupan masyarakatnya untuk kembali normal. Demikian beberapa masukan dan pertimbangan yang diutarakan dari Raja Kaliamsyah Sinaga sebelum menerima dan setelah menjadi Wakil Wali Negara Sumatera Timur (Majalah Saur 2012).

Raja Kaliamsyah secara sah menjadi Wakil Wali Negara Sumatera Timur yang mendampingi oleh Dr. Mansoer sebagai Ketua Wali NST setelah pasca di hapuskannya sistem swapraja di wilayah Sumatera Timur. Perannya di NST cukup sentral karena menduduki jabatan sebagai Wakil Wali Negara. Namun, perjuangan NST yang bercorak serikat (RIS) tidak berlangsung lama, akibat dari rembuk kembali ke pangkuan NKRI. Pada masa situasi ketidakstabilan wilayah Sumatera Timur. Mereka para bekas pimpinan Kesultanan dan Kerajaan di wilayah Sumatera melakukan pertemuan muktamar dengan topik pembahasan memikirkan tindak lanjut keberadaan mereka, dengan membahas kedudukan Negara Sumatera Timur dan tentang delegasi dalam acara perundingan Konferensi Meja Bundar di Belanda (Damanik 2018, 78).



*Gambar 3. Raja Kaliamsyah Sinaga dan Delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag (Sumber: KITLV)*

Dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag delegasi Indonesia diikuti oleh tujuh Negara bagian dan sembilan daerah otonom yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden RIS Dr. Moh Hatta mewakili Negara Republik Indonesia Serikat. Sedangkan negara bagian Sumatera Selatan diwakili oleh Wali Negara/Presiden yaitu Abdul Malik dan dari Negara Sumatera Timur yang menjadi Ketua delegasinya ialah Raja Kaliamsyah Sinaga/ yang jabatan di NST adalah sebagai Wakil Wali Negara. (Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia 2022). Dalam KMB di Den Haag Belanda memutuskan bahwa kedaulatan Republik Indonesia hanya akan diserahkan kepada Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) bukan terhadap negara Republik Indonesia yang pada saat itu beribukota di Yogyakarta. Maka dengan sehubungan dengan hal tersebut sehingga pada tanggal 27 Desember 1949 di Den Haag maka dirancang Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, kemudian ditandatangani oleh 7 Negara bagian dan 9 daerah Otonom lainnya (G. M. Kahin, Nasionalisme dan Revolusi Indonesia 2022, 389)

Pada Triwulan I tahun 1950 sesuai dengan kesepakatan awal antara Raja Kaliamsyah Sinaga dengan Dr. Moh. Hatta Negara Sumatera Timur menyatakan keluar dari Republik Indonesia Serikat dan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Akan tetapi dalam kegiatan sehari-hari, Negara Sumatera Timur tetap berjalan sebagaimana biasa sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 yaitu disahkannya UUD Sementara Negara Republik Indonesia, dengan diberlakukannya UUD Sementara maka otomatislah bubarlah Negara Sumatera Timur dan eks wilayah Negara Sumatera Timur menjadi wilayah Republik Indonesia (Nurdolt 2011, 62). Semasa menjadi Wakil Wali Negara/Wakil Presiden sampai dengan menunggu realisasi penyatuan kembali ke NKRI Raja Kaliamsyah Sinaga dan keluarga masih tinggal menetap di rumah dinas di Jalan Manggalan persisnya di persimpangan Jalan Sudirman di daerah Medan Baru (A. Sinaga 2022) .

Pada satu kesempatan Raja Kaliamsyah Sinaga membuat pernyataan pemerintah di Dewan NST atas nama Wali Negara NST. Pemerintah pertama menyarankan untuk menerima semua keputusan pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) tentang penggabungan Sumatera Timur ke dalam negara kesatuan, untuk kepentingan pembangunan yang teratur. Selain itu, bagaimanapun, NST berpendapat bahwa dewan harus mempertahankan tuntutanannya untuk perpanjangan otonomi daerah Negara Sumatera Timur namun semua itu tampaknya sia-sia karena pada akhirnya

NST kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (Indonesia) pada Agustus 1950. Dengan demikian, strategi yang dirancang oleh Raja Kaliamсыah Sinaga dan Dr. Moh. Hatta dalam memperjuangkan Republik Indonesia dalam bingkai persatuan ternyata berhasil. Setelah sebelumnya Raja Kaliamсыah benar-benar dilema Republik antara memperjuangkan etnisnya atau memperjuangkan negaranya, hasil yang kemudian ia terima adalah keduanya. Keduanya memang patut diperjuangkan tanpa menciderai satu sama lain prinsip dasar itu memang benar-benar harus menjadi rujukan (Suprayitno 2001, 250).

### ***Menjadi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pusat***

Setelah pulang dari Belanda dalam rangka terselenggaranya Konferensi Meja Bundar yang dilaksanakan di Den Haag Belanda. Raja Kaliamсыah Sinaga pada akhirnya menetap di Jakarta. Pada 18 Februari tahun 1951 setelah pelepasan NST ke dalam NKRI berjalan dengan mulus, Raja Kaliamсыah Sinaga dipanggil ke Jakarta dan ditugaskan sebagai pejabat pegawai tinggi pada Departemen Dalam Negeri (ANRI 1953). Dan beberapa bulan kemudian Pringgodigdo yang saat itu menjabat sebagai ketua BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) meminta Raja Kaliamсыah Sinaga untuk membantunya dalam jabatan itu, sekaligus mengangkat beliau sebagai salah satu dari lima anggota BPK yang kedudukannya setara setingkat Menteri. Dalam perjalanan waktu selanjutnya disamping sebagai anggota BPK beliau diminta pula untuk mengajar pada perguruan tinggi STIKEN (Sekolah Tinggi Keuangan Negara) yang berstatus sebagai sekolah kedinasan yang bernaung di bawah Departemen Keuangan (Agung 2022). Pada tahun 1970 secara resmi Raja Kaliamсыah Sinaga mengakhiri tugasnya dan pensiun dari pegawai tinggi negeri, akan tetapi Sri Sultan Hamengkubowono IX yang saat itu adalah sebagai ketua BPK meminta beliau lagi untuk terus menjabat dan bertugas sebagai anggota BPK sampai pada masa tugas selesai (Agung 2022).

Ketika Raja Kaliamсыah menjadi pejabat Badan Pengawas Keuangan di pemerintahan pusat Surat Keputusan penunjukan dan pengangkatan beliau yang langsung di tanda tangani langsung presiden Soekarno, setelah beberapa menjabat di sana Raja Kaliamсыah dan kemudian berpindah lagi ke departemen yang lain yaitu pejabat kementerian dalam negeri yang posisinya setara menteri. Uniknyanya dalam perjalanan Raja Kaliamсыah menjadi pejabat tinggi negeri, tidak pernah beliau minta, melainkan kawan-kawan beliau pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, seperti wakil presiden Moh. Hatta, Sultan Hamengkubono IX merekalah yang menawarkan beliau jabatan tanpa pernah di minta oleh Raja Kaliamсыah Sinaga. Begitu rendah hatinya beliau yang tidak mau meminta-minta posisi dan sebuah jabatan, pada akhirnya beliau pensiun dari pemerintahan beliau tetap teguh untuk tidak mau memakai fasilitas negara yang diberikan padanya, ketika sudah pensiun beliau malah meninggalkan rumah dinas dan semua fasilitas yang ada tidak beliau bawa (Sinaga 2022). Sampai pada akhirnya ketika beliau terbang ke Makkah untuk melakukan ibadah haji, dan disanalah beliau menghembuskan nafas terakhirnya saat perjalanan ibadah umroh di tanah suci, pada tahun 1981. Dimana dalam keyakinan agama Islam, jikalau seseorang telah meninggal ketika dalam perjalanan umroh maka jasadnya tidak akan di bawa kembali ke negara asalnya, akan

tetapi melainkan di makamkan di tanah suci Makkah itu juga, sesuai dengan apa yang telah di ikhtiarkan beliau semasa hidupnya (Purba 2022).

#### **4. SIMPULAN**

Tidak mudah dalam menulis sebuah biografi dari Tuan Raja Kaliamsyah Sinaga secara kritis, oleh karena kepribadian dari tokoh tersebut yang cenderung tertutup dan umumnya tidak seperti tokoh-tokoh lain yang cenderung memiliki ketenaran. Walaupun demikian, tokoh seperti Raja Kaliamsyah Sinaga sangat penting untuk diangkat ke permukaan. Sebab tidak jarang sekali tokoh-tokoh Indonesia yang mempunyai peranan penting baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan tidak tercatat dalam sejarah. Raja Kaliamsyah Sinaga tercatat sebagai seorang sosok yang baik di mata rakyatnya. Sekalipun Kaliamsyah berasal dari keluarga kalangan Kerajaan dan dapat dikatakan jarang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tetapi sejak pemerintahannya tidak satu pun rakyatnya mengaku pernah terzalimi olehnya. Contoh teladan ini sebenarnya berasal dari pendidikan yang ia tempuh, pendidikan memanusiakan manusia.

Setelah Indonesia merdeka sekitar Maret tahun 1946 Tanah Jawa yang merupakan Kerajaan yang dipimpinnya menjadi korban keganasan Revolusi Sosial, harta, tahta, pangkat, dan kerabat semuanya lenyap. Namun hal itu tidak membuat Kaliamsyah menjadi dendam terhadap republik seperti manusia pada umumnya. Justru sebaliknya, ia sengaja menerima jabatan sebagai Wakil Wali Negara Sumatera Timur tahun 1947. Awalnya memang jabatan ini membuat Kaliamsyah dilema republik karena dianggap tidak pro kemerdekaan, namun hal itu merupakan strategi untuk mengusir Belanda lebih cepat dari Indonesia strategi itu terbukti berjalan dengan mulus.

Setelah Republik Indonesia Serikat (RIS) ia diminta oleh kawan-kawan seperjuangan untuk menjabat di Badan Pemeriksa Keuangan. Jabatan itu tidak pernah ia minta sama sekali, melainkan kepercayaan yang diberikan kepadanya karena sejak masa perjuangan selalu membela kepentingan republik. Sekitar tahun 1981 ia menunaikan haji ke Makkah dan di sana pulalah dia menghembus nafas terakhir sebagai seorang yang sampai akhir hayatnya mengabdikan diri untuk negeri ini.

#### **5. UCAPAN TERIMAKASIH**

Artikel ini merupakan bagian dari tesis di program Pascasarjana Magister Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatera Utara. Penulis utama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Suprayitno, M. Hum. sebagai pembimbing pertama yang telah memberikan masukan, tanggapan, dan kritik yang membangun. Penulis utama juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nuhung, Ph. D. sebagai pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan masukan terhadap tesis tersebut.

#### **6. DAFTAR PUSTAKA**

Agung, Ridwan Helmi Ratu, interview by Leonardo Haloho. 2022. (Desember 20).

- Anderson, Benedict. 2018. *Revolusi Pemuda*. Tangerang: Marjin Kiri.
- ANRI. 1953. *Pengangkatan sebagai Pejabat di Kementerian Dalam Negeri*. Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Jakarta: ANRI.
- ANRI. 1939. *SoK Het recht op de Woeste Grond in het Landschap Tanah Djawa, Kaliamsjah Sinaga*. Jakarta: ANRI.
- Budi Agustono, dkk. 2012. *Sejarah Etnis Simalungun*. Medan.
- Courant, Deli. 1941. *Kaliamsjah Sinaga: Nederlanders Krijgen Straks Positie van Bevoorrecht Buitenlanders*. Newspaper, Kaliamsjah Sinaga : Nederlanders Krijgen Straks Positie van Bevoorrecht Buitenlanders: Deli Courant.
- Damanik, Erond. 2018. *Menafsir Kebudayaan Lewat Foto*. SIM.
- Hasibuan, Yandi Syaputra. 2021. *Aksi Kekerasan Westerling di Kota Medan*. Yogyakarta: KBM Indonesia.
- Kahin, George McTurnan. 2022. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kuntowijoyo. 2014. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurasawa, Aiko. 2016. " Propaganda Media on Java under the Japanese 1942-1945." *Bijdragen* 417-420.
- Leirissa, dkk. 2017. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
2012. "Majalah Saur."
- Malaka, Tan. 2017. *Menuju Indonesia Merdeka 100%*. Yogyakarta: Narasi.
- Nurdolt, Henk S. 2011. "Indonesia in the 1950s Nation, Modernity, and the Post-colonial State." *Bijdragen tot de Taal-,Land-en Volkenkunde* 62.
- Oktorino, Nino. 2017. *Invasi Ke Sumatera*. Jakarta: Kompas.
- P.A.L.E, Van Dijk. 1894. "Laporan mengenai Simalungun dalam TBG Sejarah Simalungun." In *Laporan mengenai Simalungun dalam TBG Sejarah Simalungun*, by Van Dijk P.A.L.E, 67. Simalungun.
- Pelzer, Karl. 2016. " East Sumatra' Growth: Planter and Peasant, Population and Comuunications." *Bijdragen* 64.
- Purba, Djamen, interview by Leonardo Haloho. 2022. (Agustus 14).
- \_\_\_\_\_, Anthony. 2012. *Sumatera: Revolusi dan Elite Tradisional*. Depok: Komunitas Bambu.
- Reid, Anthony. 2016. "Sumatra: Revolution and Traditional Elite." *Bijdragen tot de Taal-.Land-en Volkenkunde* 19.
- Ricklefs, M.C. 2017. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: UGM Press.
- Simbolon, Kolonel M. 1952. "Pemeriksaan yang Berwajib dan Laporan Gubernur Militer VII Sumatera Utara ." *Berita Acara*, Jakarta.
- Sinaga, Asmara, interview by Leonardo. 2022. (Desember 12).
- Suprayitno. 2001. *Mencoba (Lagi) Menjadi Indonesia*. Yogyakarta: YUI.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. 1978. *Menulis Biografi*. Jakarta: Kompas.
- Syamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Vansina, Jan. 2017. *Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Ombak.